

## **ABSTRAK**

Auda Anniza S Said (01656210071)

### **AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN CAMPURAN KHUSUSNYA BENDA TETAP SETELAH DIBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG**

(xii + 108 halaman; 2 tabel; 1 lampiran)

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain yang disebutkan jelas dalam perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memecahkan masalah pembagian harta perkawinan campuran khususnya benda tetap setelah dibuatnya perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung (Studi Kasus Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2017/PN. Jkt.Sel). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, menggunakan data primer dan data sekunder, dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara, pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini, perjanjian perkawinan bertujuan untuk memisahkan harta agar pasangan suami istri dapat terhindar dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pasangan suami istri, dan dapat menjadi perlindungan bagi pasangan tersebut. Perjanjian perkawinan sangatlah penting, khususnya bagi perkawinan campuran karena keberadaannya dalam perkawinan campuran berguna untuk warganegara Indonesia agar dapat memiliki hak atas tanah dengan status hak milik. Apabila perkawinan campuran tidak terdapat perjanjian perkawinan, maka warganegara Indonesia tersebut tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, harus dibuat dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat dengan melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Referensi: 53 (1974-2021)

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran

## **ABSTRACT**

Auda Anniza S Said (01656210071)

### **LEGAL CONSEQUENCES ON MIXED MARRIAGE ASSETS DISTRIBUTION PARTICULARLY IMMOVABLE ASSETS AFTER THE MAKING OF A MARRIAGE AGREEMENT DURING THE MARRIAGE**

(xii+ 108 pages; 2 tables; 1 attachments)

Following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, a Marriage Agreement can be made prior to, at the time, or during the marriage. The Marriage Agreement is in effect at the time the marriage takes place, unless there are other provisions clearly stated in the Marriage Agreement. This study aims to understand and solve the problem of Mixed Marriage assets distribution particularly on immovable assets after the making Marriage Agreement during the marriage (Case Study on Court Decision Number 619/Pdt.P/2017/PN. Jkt.Sel). This research is an Normative-Empirical Legal Research, in which uses primary data and secondary data, done through a literature study and conducting interviews, and with a case approach. The results in this study, the Marriage Agreement aims to separate assets so that the husband and wife can avoid losses that can be caused by the husband and wife, and can be a protection for the couple. Marriage Agreements are very important, especially for mixed marriages because their existence in mixed marriages is useful for Indonesian citizens to have rights to land with the status of property rights. If a Mixed Marriage does not have a Marriage Agreement, the Indonesian citizen cannot have ownership rights to the land. In the making of a Marriage Agreement, considering the legal requirements of an agreement is a must. If a Marriage Agreement is made by violating the boundaries of law, religion and decency, then the marriage agreement cannot be implemented.

Reference: 53 (1974-2021)

Keywords: Marriage Agreement, Mix Marriage